

Tim Transisi Siap Amankan Agenda Pemerintahan Baru di Kota Kupang



Kupang, nwartapedia.com – Untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan mulus, tim transisi yang terdiri dari enam anggota resmi dibentuk.

Tim ini mencakup perwakilan dari Partai Gerindra, PSI, dan tim pemenang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang terpilih, dr. Christian Widodo dan Serena Francis.

“Tim transisi bertugas memastikan sinkronisasi antara pemerintahan lama dan baru, sehingga semua program prioritas bisa segera dijalankan begitu pelantikan selesai,” kata Isodorus Lilijawa, salah satu anggota tim transisi dalam konferensi pers yang berlangsung di Klinik Kupang Graha Medika pada Sabtu (18/1/2025).

Sementara itu, Wali Kota terpilih, dr. Christian Widodo memberikan apresiasi kepada tim transisi yang telah menjembatani komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Dengan adanya tim ini, kami sudah bisa merancang berbagai

program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Salah satu program utama yang telah dirancang dalam Anggaran Tahun 2025 adalah penanganan sampah, yang menjadi isu prioritas di Kota Kupang.

Christian Widodo berharap program ini dapat berjalan optimal pada akhir 2025 dan memberikan dampak signifikan pada tahun berikutnya.

“Kami ingin saat pelantikan nanti, pemerintahan ini bisa langsung berlari kencang untuk melayani masyarakat,” tegas Christian.

Christian juga memberikan pesan tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak merasa khawatir tentang stabilitas posisi mereka selama lima tahun ke depan.

“Selama kinerja baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami akan fokus pada peningkatan pelayanan dan memaksimalkan potensi ASN yang ada,” ujarnya, menegaskan pentingnya dedikasi dalam melayani masyarakat.

Menurutnya, tim ini memiliki peran strategis untuk memastikan kelancaran proses transisi dan mengawal realisasi program-program prioritas pemerintahan baru.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen dr. Christian Widodo dan Serena Francis untuk memulai kepemimpinan mereka dengan efisiensi dan fokus pada kebutuhan masyarakat,”ungkapnya..

Wali Kota Terpilih ini berharap sinergi antara tim transisi, OPD, dan para ASN mampu mempercepat pencapaian target pembangunan di Kota Kupang.

Adapun enam anggota tim transisi yang ditunjuk adalah Isodorus Lilijawa, Merry Salouw, Kanisius To, Muhamad Ramli, Ahmad Talib dan Kenny Sau. (MI)

Pimpin dengan Efisiensi, Wali Kota Kupang Terpilih Alihkan Anggaran Mobil Dinas ke Program Rakyat



Kupang, nwartapedi.com – Wali Kota dan Wakil Wali Kota kupang terpilih, dr. Christian Widodo-Serena Francis akan memulai masa kepemimpinan mereka dengan langkah berani dan tegas.

Mereka menolak pengadaan mobil dinas baru dan memilih mengalihkan anggarannya untuk mendukung program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan tetap menggunakan mobil dinas yang lama. Anggaran yang cukup besar untuk pengadaan mobil baru itu lebih baik dialihkan ke program prioritas,” ujar Christian Widodo saat konferensi pers yang digelar di Klinik Kupang Graha Medika pada Sabtu (18/1/2025).

Keputusan ini, menurut Christian Widodo diambil setelah melalui diskusi dengan DPRD Kota Kupang.

“Kami berdua menolak mobil dinas dan didukung oleh DPRD Kota Kupang. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah mendukung kami,” tambahnya.

Langkah ini tidak hanya menjadi simbol efisiensi anggaran, tetapi juga mencerminkan komitmen transparansi dalam mengelola dana publik.

Christian Widodo menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari visi mereka untuk menciptakan perubahan yang nyata di Kota Kupang.

“Menolak fasilitas baru dan memprioritaskan efisiensi anggaran adalah bukti komitmen kami untuk membangun Kota Kupang yang lebih baik dan berdaya saing,” jelasnya.

Keputusan ini mendapat respons positif dari masyarakat, yang mengapresiasi kebijakan tersebut sebagai bukti keberpihakan pada kebutuhan rakyat.

Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas akan difokuskan pada program-program prioritas, seperti peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemimpin daerah lain untuk mengutamakan efisiensi dan kebermanfaatan anggaran, demi terciptanya pemerintahan yang lebih berpihak pada rakyat. (MI)